

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sosial dan globalisasi yang terjadi kini dalam segenap aspek kehidupan memang sudah tidak dapat dicegah. Pada satu sisi, adanya perubahan sosial dan globalisasi memberikan kemudahan peluang untuk mengakses dan memperoleh informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kualitas kehidupan, namun disisi lainnya, perubahan sosial dan globalisasi juga berdampak pada berubahnya tatanan nilai sosial budaya masyarakat.

Dalam kaitan ini, peran pendidikan pada masa kini dan masa depan semakin penting, terutama dalam mereorientasikan pola berfikir, bersikap dan bertindak yang sesuai dengan tatanan nilai sosial baru dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pada segenap aspek kehidupan. Proses pendidikan tidak dapat lagi hanya sekedar mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, melainkan harus diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat mengantisipasi dinamika perubahan sosial dengan mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Pada masa kini dan masa depan, yang penting diperhatikan adalah proses pendidikan yang dapat membangkitkan potensi kemampuan intelektual, sikap dan keterampilan pada setiap peserta didik. Makagiansar (1990: 5) berpandangan bahwa untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, proses pendidikan harus mampu setidaknya

mengembangkan kemampuan; (1) mengantisipasi (*anticipate*), (2) mengerti dan mengatasi situasi (*cope*), (3) mengakomodasi (*accommodate*) dan (4) mereorientasi (*reorient*) dari peserta didik.

Pada Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional termuat tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional (Pasal 3). Selanjutnya pada pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 1989 menyebutkan tentang tujuan pendidikan nasional yakni;

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka dapat disimak bahwa setidaknya terdapat dua arah pendidikan di Indonesia, yakni; *pertama*, pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk manusia Indonesia yang cerdas, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan diarahkan untuk membangun, mengembangkan kemampuan dan keterampilan kognitif. *Kedua*, pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan afektual. Dua dimensi arah pendidikan ini selayaknya menjadi dasar bagi upaya pendidikan yang dilakukan di Indonesia dalam segala jenis, jenjang dan bentuk pendidikan.

Satu langkah untuk menerjemahkan arah pendidikan nasional tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan pendidikan berupa pentahapan pendidikan dalam bentuk, jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan pada jalur sekolah dan luar sekolah. Sekolah merupakan institusi dimana ilmu pengetahuan, sikap-sikap, nilai-nilai serta teknik-teknik yang diperlukan untuk dapat hidup layak di masyarakat diberikan kepada peserta didik, sehingga diharapkan dapat melanjutkan perkembangan kebudayaan masyarakat secara bertanggungjawab (Taba, 1962).

Dalam praktek pendidikan, arah pendidikan tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana terstruktur dan sistematis berupa kurikulum. Kurikulum sekolah pada umumnya memuat tentang materi pendidikan dan proses pembelajarannya. Kurikulum sekolah sebagai suatu rencana pendidikan yang disusun secara terstruktur dan sistematis setidaknya memiliki komponen berupa: (a) seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, (b) bahan pelajaran dan (c) cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (pasal 1 butir 9 UU Nomor 2 Tahun 1989). Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. (pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 1989).

Materi pendidikan merupakan komponen dalam kurikulum yang penting, namun seringkali pengorganisasiannya dalam pengembangan kurikulum

terabaikan. Materi pendidikan yang dimuat dalam kurikulum sekolah pada setiap mata pelajaran seringkali tidak terorganisasikan secara baik dan benar merujuk pada tujuan pendidikan, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler bahkan seringkali merupakan data, fakta, informasi yang banyak dan melimpah tanpa dikaitkan dengan tujuan pembelajaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukamto (2000: 58) tentang persepsi guru terhadap Kurikulum 1994 di Yogyakarta, menyebutkan bahwa materi pendidikan yang termuat dalam kurikulum 1994 di sekolah menengah terlalu luas (38%), kurang urut dan tidak runtut (59%), sehingga para guru mengalami kekurangan waktu untuk menyajikan materi dalam pengajaran (80%).

Pada pembelajaran kelompok mata pelajaran IPS di sekolah menengah, AlMughtar (2000: 53) menyebutkan bahwa materi pendidikan IPS di sekolah menengah lebih bersifat tekstual, bersumber terbatas pada buku teks, sehingga mengakibatkan masalah sosial budaya yang terdapat dalam latar peserta didik tidak dijadikan materi pelajaran secara terintegrasi, akibatnya kemampuan berfikir kontekstual tidak dapat dikembangkan secara optimal.

Hasil penelitian yang dilakukan Balitbang Depdikbud (1999) menyebutkan bahwa Kurikulum 1994 tidak disusun berdasarkan *basic competencies* melainkan berdasarkan pada materi (Boediono, et.al, 1999: 84). Akibatnya, di dalam kurikulum banyak memuat konsep teoretis dari suatu mata pelajaran. Masdjudi (1999: 4-5) berpandangan bahwa banyaknya materi yang termuat dalam kurikulum 1994 disebabkan antara lain; (a) kesulitan penentuan kriteria untuk memilih, menyaring dan menyeleksi konsep esensial pada setiap mata pelajaran,

(b) cara kerja para pengembang kurikulum yang tidak efektif karena terlalu mempertimbangkan aspek keilmuan, (c) perubahan pembagian sistem belajar siswa menjadi catur wulan sehingga hari efektif belajar menjadi berkurang, dan (d) penjurusan pada jenjang SMU pada kelas III menjadi faktor pendukung bagi semakin banyaknya materi yang dipelajari siswa pada program umum.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, jenjang pendidikan ini memiliki dua tujuan institusional, yakni;

pertama, meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, dan *kedua*, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya (pasal 2 ayat 1 PP No. 29 Tahun 1990).

Dari tujuan institusional pendidikan menengah ini, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap arah proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran di sekolah menengah. Implikasi *pertama*, bahwa materi pendidikan yang dipelajari di sekolah menengah memiliki kedudukan sebagai pengetahuan dasar keilmuan untuk didalami dan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang lanjutan di perguruan tinggi. Dalam konteks demikian, materi pendidikan yang dikembangkan akan sangat terkait dengan ruang lingkup, keruntutan dan kedalaman materi yang harus diberikan dan diterima peserta didik pada sekolah menengah. Masalah penetapan ruang lingkup, keruntutan dan kedalaman materi pada suatu mata pelajaran di sekolah merupakan masalah bagi para pendidik dan pakar pendidikan. (Hasan, 1996: 12).

Proses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah sudah tentu bukan hanya dalam rangka mencapai satu tujuan institusional, melainkan penting

diperhatikan pula arah proses pendidikan yang ditujukan pada pencapaian tujuan institusional kedua, yakni peningkatan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. Implikasi kedua, bahwa materi pendidikan yang disampaikan kepada peserta didik pada jenjang sekolah menengah harus pula disiapkan sebagai bekal pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Dalam kaitan ini, pembelajaran pendidikan ilmu sosial di sekolah menengah menjadi wahana penting untuk mewujudkan kedua tujuan institusional pendidikan menengah sekaligus.

Disadari ataupun tidak, para pengembang kurikulum senantiasa dipengaruhi oleh satu atau beberapa aliran filsafat pendidikan dan teori pengembangan kurikulum dalam mengorganisasikan materi pendidikan pada suatu mata pelajaran ke dalam kurikulum. Ansyar (1989) berpandangan bahwa filsafat dan teori pendidikan, epistemologi suatu ilmu, keadaan kondisi masyarakat dan kebudayaan, individu, teori-teori belajar, serta pemahaman terhadap dinamika sosial merupakan sebagian pengaruh yang kuat bagi muatan isi kurikulum.

Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kurikulum sekolah yang berlaku saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993. Kebijakan ini berlaku sejak tahun ajaran 1994/1995 di sekolah menengah secara bertahap mulai di kelas satu dan berlaku secara penuh untuk seluruh kelas pada tahun ajaran 1996/1997. Memperhatikan struktur mata pelajaran dalam kurikulum 1994 di sekolah menengah, kelompok

mata pelajaran IPS terbagi menjadi kelompok program umum dan kelompok program khusus ilmu-ilmu sosial.

Program pengajaran umum diselenggarakan pada kelas I sampai kelas II, sedangkan program pengajaran khusus diselenggarakan di kelas III. (Keputusan Mendikbud Nomor 0488/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum). Kurikulum SMU 1994 menerapkan sistem catur wulan dengan membagi waktu belajar satu tahun menjadi tiga catur wulan yang masing-masing catur wulan berlangsung maksimal empat bulan. (Lampiran I Keputusan Mendikbud RI Nomor 061/U/1993).

Program pengajaran umum sebagai program wajib bagi semua peserta didik kelas I dan II SMU, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan minat siswa sebagai dasar untuk memilih program pengajaran khusus yang sesuai di kelas III. Sedangkan, program pengajaran khusus diselenggarakan di kelas III dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat (lampiran Keputusan Mendikbud Nomor 061/U/1993).

Mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi di SMU menurut kurikulum 1994 merupakan mata pelajaran yang termasuk ke dalam program pengajaran umum yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik mulai kelas I dan



II SMU. Artinya, kedua mata pelajaran ini memiliki kedudukan yang penting dalam konteks membangun dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hubungan dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar, disamping sebagai bekal pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Disamping itu, mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi di SMU memiliki tujuan strategis, terutama dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dalam perspektif keindonesiaan. Oleh karena itu, kajian terhadap materi pendidikan dalam kurikulum pada kedua mata pelajaran ini di SMU menjadi penting dilakukan.

Kedudukan, posisi, fungsi dan tujuan pembelajaran kedua mata pelajaran ini menurut kurikulum SMU 1994 terlihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.1 : Sebaran Mata Pelajaran IPS di SMU Menurut Kurikulum 1994

No	Mata Pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Program Umum			
	a. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	2 jam pel	2 jam pel	2 jam pel
	b. Ekonomi	3 jam pel	3 jam pel	-
	c. Sosiologi	-	3 jam pel	-
	d. Geografi	2 jam pel	2 jam pel	-
2.	Program Khusus IPS			
	a. Ekonomi	-	-	10 jam pel
	b. Sosiologi	-	-	6 jam pel
	c. Tata Negara	-	-	6 jam pel
	d. Antropologi	-	-	6 jam pel

Tabel 1.2 : Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Sejarah dan Geografi di SMU Menurut Kurikulum 1994

No	Mata Pelajaran	Tujuan Mata Pelajaran	Fungsi Mata Pelajaran
1.	Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	Menanamkan pemahaman tentang adanya perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, <i>menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia</i> dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia.	Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan lanjutan tentang sejarah nasional dan sejarah umum untuk lebih memahami dan menghayati jati diri bangsa serta menumbuhkan wawasan hubungan antar bangsa.

2.	Geografi	Agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan berfikir analitis geografis dalam memahami gejala geosfer, <i>memupuk rasa cinta tanah air</i> , menghargai keberadaan negara lain, dan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya.	Mengembangkan sikap rasional dan bertanggung jawab dalam menghadapi gejala geosfer dan permasalahan yang timbul sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya
----	----------	---	--

Sumber: Lampiran II Keputusan Mendikbud No. 061/U/1993

Berdasarkan pemahaman terhadap tujuan institusional pendidikan menengah, serta tujuan dan fungsi pembelajaran mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi di sekolah menengah, maka menjadi penting untuk menganalisis kebijakan penetapan materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi yang termuat dalam kurikulum SMU secara substansial dan konseptual yang didasarkan pada tuntutan kepentingan pedagogis. Kesesuaian antara tujuan pendidikan, tujuan institusional dengan tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang termuat sebagai tujuan kurikuler merupakan suatu keharusan, tetapi langkah tersebut seringkali pada proses pembelajaran di sekolah sulit dilaksanakan, termasuk dalam penetapan materi pendidikan pada suatu mata pelajaran.

Secara substansial, pendidikan ilmu sosial di sekolah menengah merupakan proses pendidikan yang tidak terpisah dari perkembangan ilmu sosial, serta perkembangan dan dinamika sosial. Oleh karena itu, untuk dapat menganalisis tentang pendidikan ilmu sosial di sekolah, sewajarnya ditempatkan pada konteks perkembangan ilmu sosial tersebut dalam masyarakat (Dimiyati, 1989: 62). Pendidikan ilmu sosial di sekolah dipandang sebagai kajian di dalam program pendidikan yang meliputi hubungan antar manusia di dalam masyarakat, serta sebagai program pengajaran yang terkait dengan masalah pendekatan, metodologi,



penilaian, di dalam rangka proses pendidikan di sekolah (Dekker, 1995: 3).
konteks demikian, maka pengorganisasian materi pendidikan ilmu sosial (IPS)
yang termuat dalam kurikulum SMU senantiasa perlu disesuaikan dengan kondisi
dan perkembangan masyarakat, mengingat sumber materi pendidikan IPS di
sekolah menengah pun senantiasa dinamis.

Secara teoretis, esensi pendidikan ilmu sosial di sekolah merupakan kajian
secara terintegrasi dari beragam disiplin ilmu yang bertujuan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik untuk bersikap dan mengambil
keputusan dalam menghadapi tantangan kehidupan dan tuntutan masa depan
sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab. Seperti terungkap dalam
definisi dari NCSS (1994: 3) yang mengemukakan bahwa,

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of culturally diverse, democratic society in an interdependent world.

Dengan demikian, pembelajaran IPS di sekolah sekaligus berfungsi sebagai
pendidikan pribadi (*personal education*), pendidikan intelektual (*intellectual education*) dan pendidikan sosial (*social education*) (Joyce, 1972). Fungsi pengembangan aspek nilai, sikap pribadi, pengembangan potensi dan kemampuan kognitif serta pengembangan keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS di sekolah berimplikasi terhadap tuntutan pemilihan dan pengorganisasian materi pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Dalam kaitan dengan pemilihan materi pendidikan IPS di sekolah, hendaknya lebih berorientasi pada kepentingan pedagogis, sedangkan pertimbangan akademis dibutuhkan saat penentuan kecukupan ruang lingkup, keruntutan, validitas dan kedalaman materi dimaksud (Hasan, 1996:16). Pengorganisasian materi yang bersumber dari ilmu-ilmu sosial menjadi materi pendidikan IPS di sekolah menengah selayaknya mempertimbangkan aspek pedagogis. Dalam konteks pertimbangan pedagogis, antara lain menyangkut pertimbangan aspek perkembangan peserta didik, aspek perkembangan teori pembelajaran, dan aspek lingkungan belajar.

Perlu disadari, akibat dari dinamika kehidupan sosial yang terjadi sudah tentu akan menumbuhkan aspirasi dan keinginan masyarakat semakin luas, bervariasi, cepat, kuat dan menyeluruh. Perubahan yang demikian cepat ini dapat mengakibatkan perubahan pada tatanan nilai sosial dan budaya. Adanya perbedaan sistem struktural dan perilaku kemasyarakatan yang tumbuh, seringkali bertentangan dengan kaidah moral dan nilai. Arah masa depan tentang struktur dan perilaku sosial pada tingkat individu, lokal, nasional dan global seringkali terabaikan untuk diorganisasikan menjadi materi pembahasan dalam konteks pendidikan, termasuk dalam proses pembelajaran sejarah dan pembelajaran geografi di sekolah menengah.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan pendidikan ilmu sosial (IPS) di sekolah di Indonesia telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Somantri (1988), Sumaatmadja (1983), Hasan, (1984), Abdurrachman (1985), Al Muchtar (1991), Wiriaatmadja (1992), Sulisyana

(1997), Lasmawan (1997), Farisi (1997), Wachidi (2000), Kamarga (2000), Ghufron (2001), Nurdin (2001), dan Matsum (2001) merupakan beberapa penelitian yang mengungkap tentang proses pembelajaran IPS di sekolah dalam beragam perspektif, seperti dari perspektif pengembangan kurikulum, pendekatan model proses pembelajaran, respon peserta didik terhadap proses pembelajaran serta upaya inovasi dalam proses pembelajaran IPS. Fokus masalah penelitian terhadap pembelajaran IPS di sekolah (sekolah dasar dan sekolah menengah) masih dikaji dalam kerangka lingkup mikro, pada tahap proses pembelajaran di sekolah. Penelitian berkenaan dengan analisis kebijakan tentang dasar pertimbangan filosofi pendidikan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, analisis kebijakan tentang struktur dan komposisi materi pendidikan ilmu sosial (IPS) di sekolah masih belum banyak dilakukan, termasuk pada mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi di sekolah menengah umum.

Materi pendidikan yang disajikan kepada peserta didik pada proses pembelajaran sejarah dan pembelajaran geografi di sekolah menengah sudah selayaknya tidak mengabaikan aspek dari dinamika perubahan sosial yang berkembang. Secara substansial, materi pendidikan akan memuat tentang pandangan, tema, topik, fenomena, fakta, peristiwa, prosedur, konsep, generalisasi, dan teori. Sedangkan secara prosedural, materi pendidikan akan berkenaan dengan proses, prosedur dan langkah yang harus dilaksanakan peserta didik dalam mempelajari materi secara substantif (Hasan, 1996; 2000: 24).

Dalam kerangka proses pembelajaran IPS di sekolah, AIMuchtar (2000: 95) mengemukakan bahwa akan lebih baik apabila pengembangan materi subjek

dalam pembelajaran IPS dilakukan dengan menggunakan pendekatan kependidikan secara konsisten dengan diorientasikan untuk kepentingan pembelajaran peserta didik agar proses pembelajaran IPS di sekolah lebih berkualitas. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Wahab (1991) yang menyarankan agar materi IPS hendaknya mampu membantu peserta didik menjadi warga negara yang efektif, dengan memfokuskan perhatian pada level pengetahuan tingkat tinggi, dan bukannya menyajikan sekedar fakta-fakta, mengajarkan tentang perkembangan dengan menggunakan materi pelajaran yang membantu peserta didik untuk mengembangkan diri, klarifikasi, reflektif dan identifikasi positif dengan budaya lokal dimana berada, secara nasional maupun global.

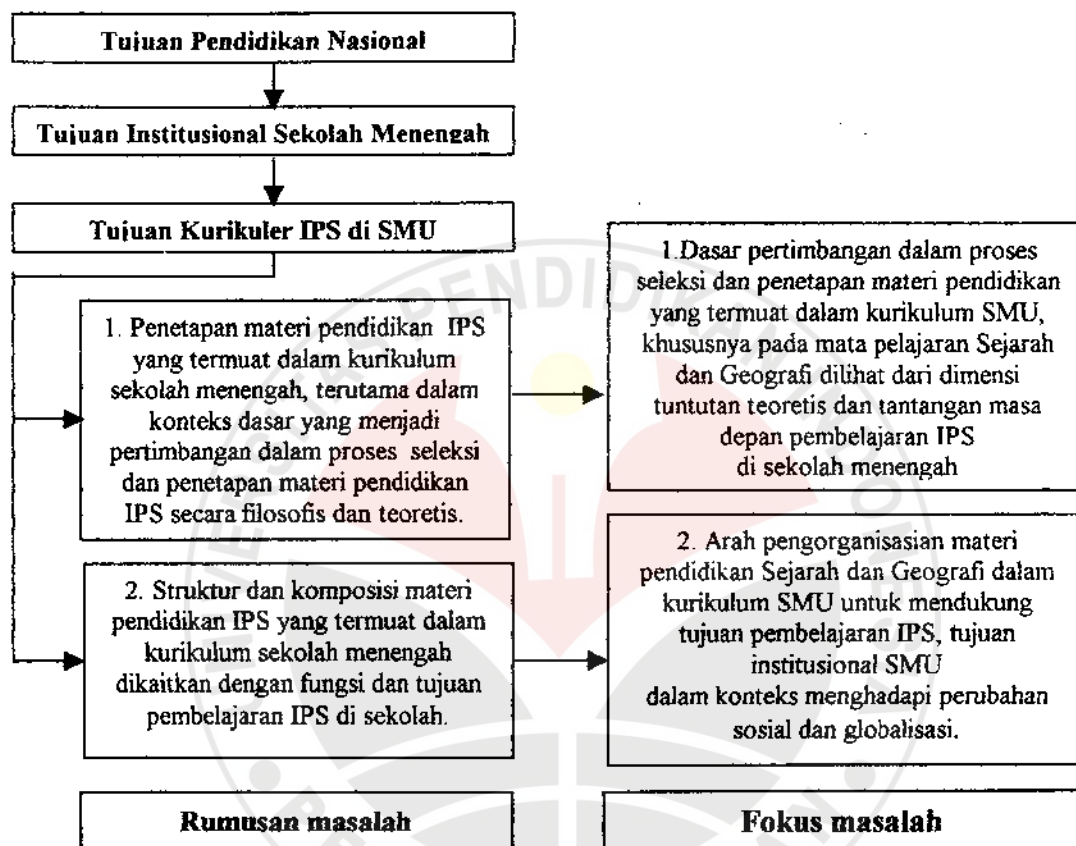
B. Masalah

Pengorganisasian materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kerangka proses pembelajaran IPS di sekolah, yang termuat dalam kurikulum sekolah menengah umum senantiasa akan mengalami suatu dilema. Dilema antara memenuhi tuntutan kebutuhan untuk mengantisipasi perubahan sosial di masyarakat atau memenuhi tuntutan kebutuhan sebagai pengetahuan akademik. Buchori (1990: 21) berpandangan bahwa perlu adanya tinjauan kembali terhadap program akademik di sekolah menengah dan menelaah relevansinya ditinjau dari gejala globalisasi atau kebutuhan konkret di tingkat lokal.

Dalam perspektif demikian, maka menjadi penting untuk menganalisis kebijakan tentang pengorganisasian materi pendidikan ke dalam kurikulum sekolah menengah umum pada mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi dalam kerangka proses pembelajaran IPS di sekolah. Masalah dalam konteks kebijakan pengorganisasian materi pendidikan akan menyangkut aspek proses seleksi dan penetapan materi pendidikan dalam kurikulum sekolah pada mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi di sekolah menengah umum, terutama tentang dasar yang menjadi pertimbangan dalam proses seleksi dan penetapan materi pendidikan secara filosofis dan teoretis.

Seleksi dan penetapan materi yang bersumber dari ilmu-ilmu sosial menjadi materi pendidikan ilmu sosial (IPS) di sekolah menengah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran akan berimplikasi terhadap kualitas materi pendidikan pada jenjang sekolah menengah, termasuk pada seleksi dan penetapan materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi di sekolah menengah umum. Dalam konteks demikian, maka menjadi penting untuk menganalisis tentang struktur dan komposisi materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kerangka proses pembelajaran IPS di sekolah menengah, yang termuat dalam kurikulum SMU dikaitkan dengan dinamika perubahan sosial dan globalisasi. Pada masa depan, model susunan struktur dan komposisi materi pendidikan yang termuat dalam kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran serta ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik akan sangat dibutuhkan.

Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan sebagai suatu kebijakan pendidikan nasional, senantiasa menjadi acuan dasar dalam setiap implementasi proses pembelajaran di tiap jenjang dan tiap mata pelajaran. Dalam konteks pemikiran ini, alur perumusan masalah penelitian terlihat di bawah ini.



Gambar 1.1 : Alur Perumusan Masalah

C. Fokus Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Mendasarkan pada perumusan masalah, maka penelitian ini menetapkan dua fokus masalah penelitian serta masing-masing dikembangkan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Fokus masalah 1:

Dasar pertimbangan dalam proses seleksi dan penetapan materi pendidikan yang termuat dalam kurikulum SMU, khususnya pada mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi dilihat dari dimensi tuntutan teoretis dan tantangan masa depan pembelajaran IPS di sekolah menengah.

Pertanyaan Penelitian:

1. Pertimbangan filosofi pendidikan apa yang menetapkan bahwa pada sekolah menengah umum diberikan materi pendidikan tentang pengetahuan sejarah dan pengetahuan geografi ?
2. Teori pengembangan kurikulum mana yang menjadi acuan dalam proses seleksi dan penetapan materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum SMU 1994 ?
3. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman apa yang dapat dianalisis dari bentuk susunan materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi yang termuat dalam kurikulum SMU 1994 dilihat dari dimensi tuntutan teoretis dan tantangan masa depan pembelajaran sejarah dan pembelajaran geografi di sekolah menengah.?

Fokus masalah 2 :

Arah pengorganisasian materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi dalam kurikulum SMU untuk mendukung tujuan pembelajaran IPS, tujuan institusional SMU dalam konteks menghadapi perubahan sosial dan globalisasi.

Pertanyaan Penelitian:

1. Model pengorganisasian materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi apa, dalam kurikulum sekolah menengah yang memenuhi tuntutan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan ?
2. Model struktur dan komposisi materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi apa, dalam kurikulum sekolah menengah yang selaras dengan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dan tujuan institusional SMU.?
3. Bagaimana membangun model susunan materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi dalam kurikulum sekolah menengah yang memenuhi kriteria: secara pedagogis relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik, secara substansial akademis memenuhi tuntutan perkembangan keilmuan dan dinamika kemasyarakatan, dan secara program pendidikan mudah untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dasar pertimbangan secara filosofis dan teori pengembangan kurikulum yang dianut dalam proses seleksi dan penetapan materi pendidikan dalam kurikulum sekolah menengah pada mata

pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi, sehingga diharapkan menghasilkan temuan model susunan struktur dan komposisi materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi yang termuat dalam kurikulum SMU dapat selaras dengan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dan tujuan institusional SMU, serta antisipatif dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi.

b. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis dan mengkonstruksikan dasar filosofi pendidikan yang menjadi pertimbangan dalam seleksi dan penetapan materi dari pengetahuan sejarah menjadi materi pendidikan pada mata pelajaran Sejarah dan materi dari pengetahuan geografi menjadi materi pendidikan pada mata pelajaran Geografi yang termuat dalam kurikulum SMU beserta rasionalitasnya.
- 2) Menganalisis dan mengkonstruksikan teori pengembangan kurikulum yang menjadi dasar acuan dalam seleksi dan penetapan materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum sekolah menengah umum tahun 1994.
- 3) Menganalisis dan mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari bentuk susunan struktur dan komposisi materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi yang termuat dalam kurikulum SMU 1994, dan suplemen GBPP 1999 dalam perspektif dimensi tuntutan teoretis dan tantangan masa depan pembelajaran sejarah dan pembelajaran geografi di sekolah menengah.

- 4) Menganalisis, membandingkan, dan mendeskripsikan susunan struktur dan komposisi materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum SMU 1994, Suplemen GBPP 1999 dan draft dokumen kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sehingga dapat menjadi bahan untuk membangun model pengorganisasian materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi dalam kurikulum sekolah menengah yang memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan.
- 5) Membangun model struktur dan komposisi materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi dalam kurikulum sekolah menengah yang selaras dengan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dan tujuan institusional SMU.
- 6) Membangun model susunan materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi dalam kurikulum sekolah menengah yang memenuhi kriteria secara pedagogis relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik, secara substansial akademis memenuhi tuntutan perkembangan keilmuan dan dinamika kemasyarakatan, serta dapat antisipatif menghadapi perubahan sosial dan globalisasi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Analisis dan konstruk model tentang pengorganisasian materi pendidikan Sejarah dan materi pendidikan Geografi dalam kurikulum SMU yang dibangun sebagai hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademik terutama dalam rangka membangun batang tubuh (*body of knowledge*)

materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kerangka proses pembelajaran IPS di sekolah, sebagai suatu program pendidikan yang fungsional. Diharapkan model yang dibangun sebagai temuan penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas materi pendidikan dan kualitas proses pembelajaran sejarah dan pembelajaran geografi di sekolah menengah yang dapat melibatkan peserta didik dalam suasana kehidupan nyata, serta melatih peserta didik dalam proses pengambilan keputusan terhadap masalah kehidupan sosialnya, seperti dikemukakan oleh Barr, Barth and Shermis (1978), bahwa pembelajaran IPS sebagai inkuiri reflektif (*social studies taught as reflective inquiry*).

b. Manfaat Praktis

Hasil analisis dan konstruk model tentang pengorganisasian materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi ke dalam kurikulum sekolah menengah sebagai hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi para pengembang kurikulum, termasuk guru mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi di sekolah menengah umum, dalam mengorganisasikan secara tepat materi pendidikan yang bersumber dari ilmu sejarah, ilmu geografi dan dari lingkup kehidupan sosial menjadi materi pendidikan yang fungsional secara komprehensif integral dan selaras dengan tujuan pembelajaran sejarah dan tujuan pembelajaran geografi di SMU.

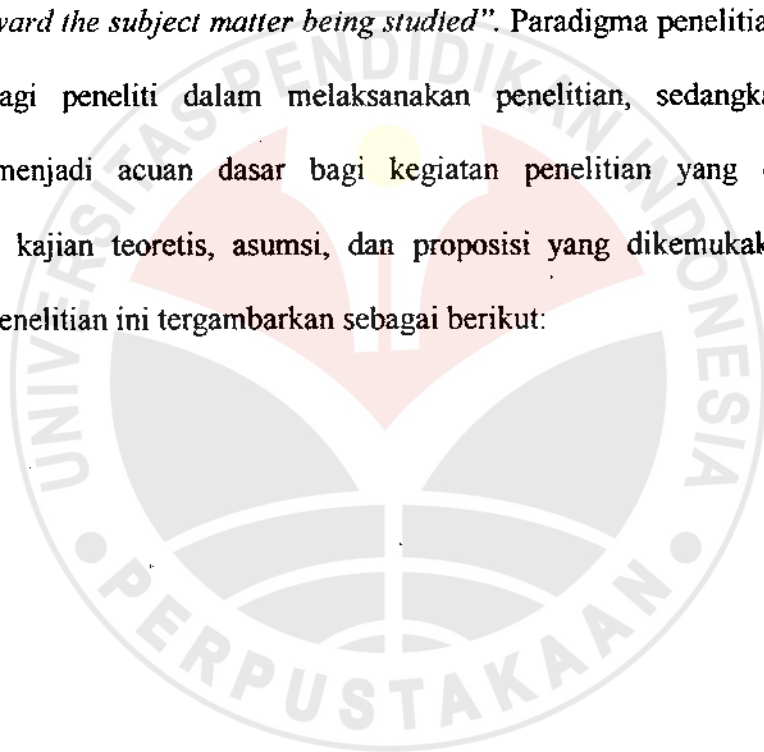
Konstruk model yang dibangun sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan dalam rangka pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan pengorganisasian materi pendidikan pada mata pelajaran Sejarah, mata pelajaran Geografi di sekolah menengah secara tepat dan relevan

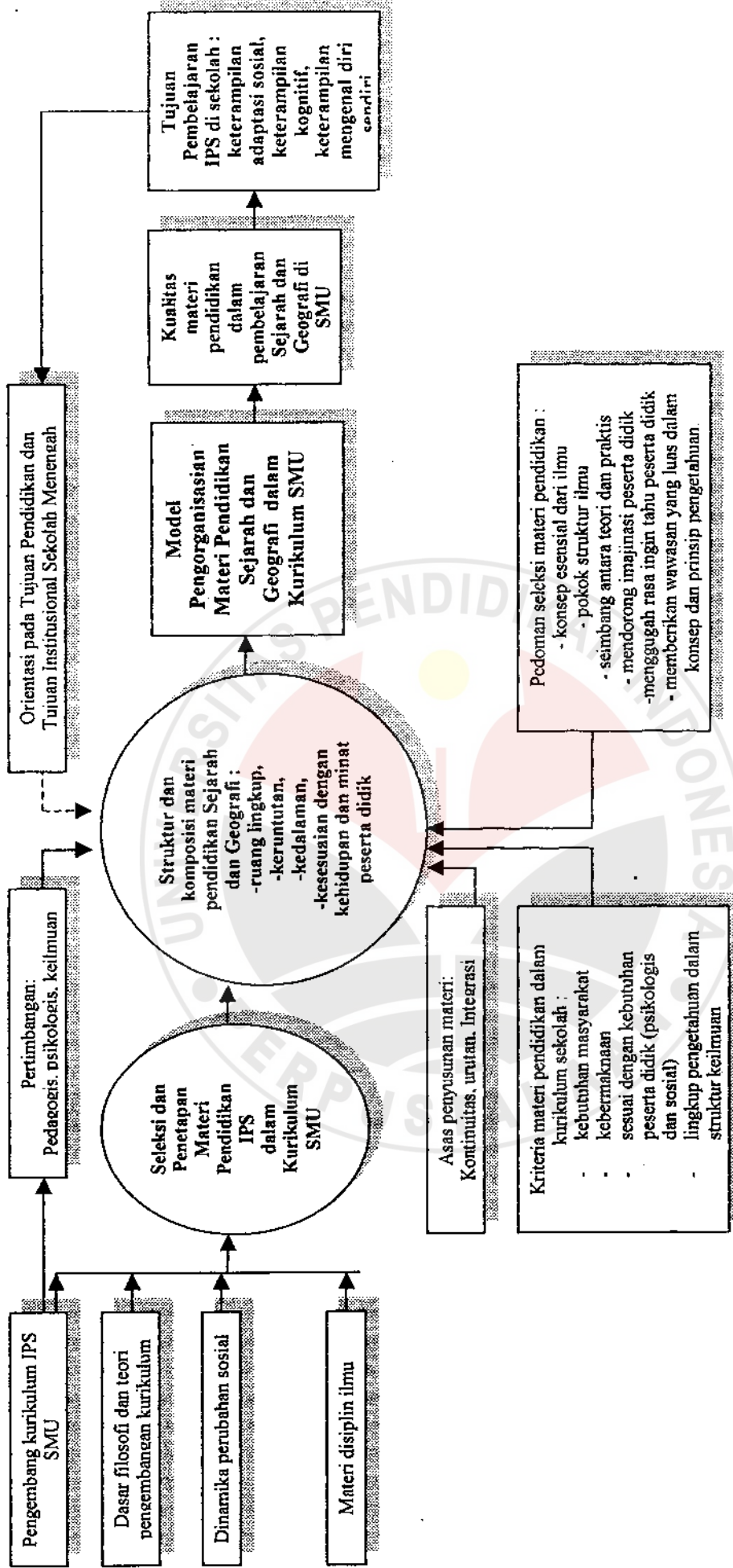


dengan kebutuhan belajar peserta didik sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas materi pendidikan sejarah dan kualitas materi pendidikan geografi di sekolah menengah umum.

E. Paradigma dan Model Penelitian

Kuhn (1970) mengartikan paradigma sebagai “ *a set of ideas, assumptions, concepts, and relationships which helps the scientist focus or direct his or her attention toward the subject matter being studied*”. Paradigma penelitian menjadi penuntun bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, sedangkan model penelitian menjadi acuan dasar bagi kegiatan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kajian teoretis, asumsi, dan proposisi yang dikemukakan, maka paradigma penelitian ini tergambar sebagai berikut:





Gambar 1.2 : Paradigma Penelitian

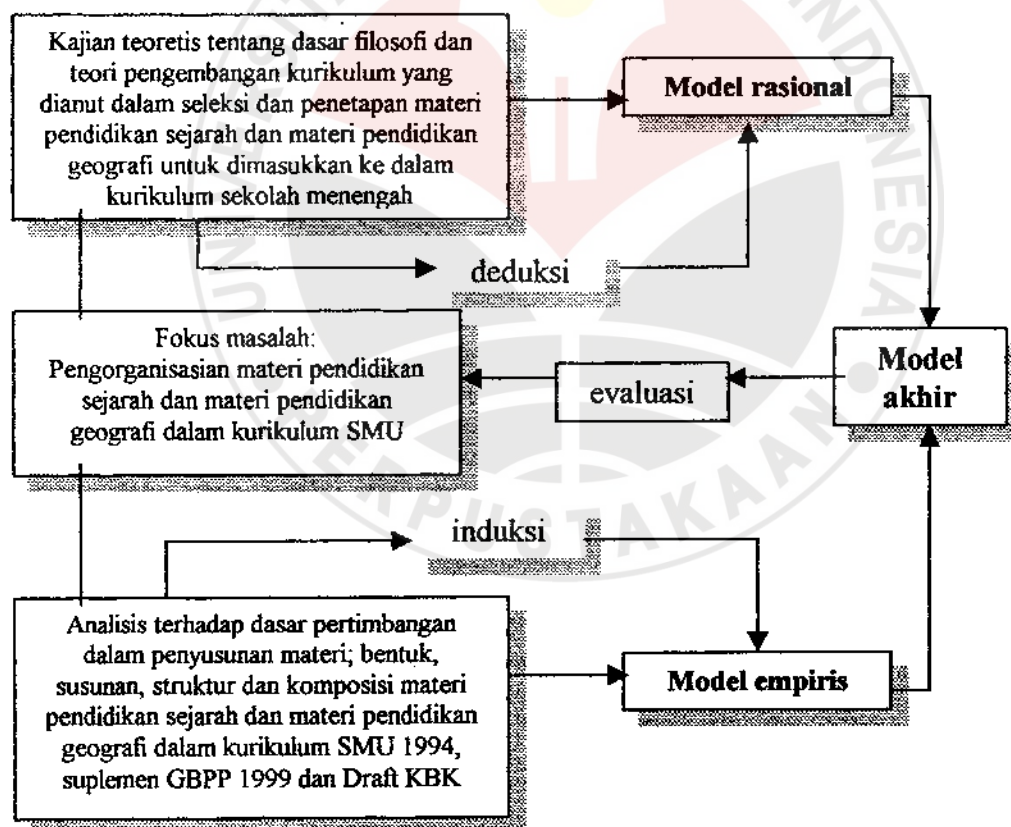
Dalam rangka menganalisis suatu masalah yang bersifat multidisiplin dalam beragam perspektif senantiasa membutuhkan alat agar terdapat kesamaan persepsi terhadap masalah dimaksud. Alat untuk menyamakan persepsi dalam memandang masalah tersebut sering disebut dengan model. Dalam konteks pendekatan sistem, pembentukan model merupakan aspek penting dalam rangka memudahkan analisis secara komprehensif, sistematis dan sistemik terhadap suatu masalah. (Amirin, 1992: 81; Suriasumantri, 1992: 7).

Model adalah suatu pencerminan, penggambaran sistem yang nyata atau abstraksi dari dunia nyata yang disederhanakan sehingga hanya parameter-parameter penting saja yang muncul dalam bentuknya dan mendeskripsikan hubungan antar parameter baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penyusunan model sebaiknya dilakukan pembatasan-pembatasan dan diajukan asumsi-asumsi tertentu secara eksplisit. (Amirin, 1992:78; Suriasumantri, 1992:11). Dalam pandangan Horton (1972:182) sebuah model adalah pencerminan atau abstraksi dari sebuah objek, proses, peristiwa, situasi atau sistem. Secara lebih luas, sebuah model adalah sesuatu yang mengungkap dan menjelaskan tentang hubungan dari berbagai komponen, aksi dan reaksi, serta sebab akibat.

Dalam membangun model, digunakan kombinasi berfikir secara deduktif dan induktif. Model yang dibentuk berdasarkan kerangka berfikir deduktif dengan mendasarkan pada pengetahuan teoretis yang relevan disebut dengan model rasional. Model yang dibentuk berdasarkan kerangka berfikir induktif dengan mendasarkan pada pengumpulan data dari objek yang dikaji disebut dengan model

empiris. Proses mengkombinasikan kedua model ini dalam rangka mencari model yang mendekati kenyataan dengan melakukan pengujian terhadap model rasional dengan kenyataan empiris, serta mencari logika ilmiah dari model empiris dengan mendasarkan pada model rasional.

Dalam konteks penelitian ini, proses mengkonstruksi model didasarkan pada analisis terhadap pengorganisasian struktur dan komposisi materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum SMU 1994 secara empiris serta arah pengorganisasian struktur dan komposisi materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi di SMU secara hipotetis.



Gambar 1.3 : Proses Membangun Model Pengorganisasian Materi Pendidikan Sejarah dan Geografi di SMU

Model yang dibangun dalam penelitian ini secara fungsional termasuk model deskriptif, dimana berupaya memaparkan objek tentang pengorganisasian materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi di SMU yang akan tergambarkan dalam matrik, gambar, bagan serta pemaparan verbal. Dalam fungsi sebagai model pengambilan keputusan, akan dikemukakan arah pengorganisasian materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi di SMU secara selektif dalam arti alternatif pilihan kebijakan untuk pemecahan masalah tentang pengorganisasian materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum sekolah menengah melalui sistem analisis dengan menggunakan analisis SWOT.

F. Asumsi yang Melandasi Penelitian

1. Kebijakan pengorganisasian materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum SMU, merupakan langkah pengembangan kurikulum yang didasarkan pada pertimbangan filosofi pendidikan dan pertimbangan teoretis yang kuat, sehingga layak menjadi suatu pedoman dalam proses pembelajaran sejarah dan pembelajaran geografi di SMU.
2. Peningkatan kemampuan berfikir tingkat tinggi yang mengandalkan pada potensi akal dan pertimbangan nilai sosial budaya yang berkembang, merupakan arah pembelajaran sejarah dan arah pembelajaran geografi dalam kerangka pendidikan IPS di sekolah, senantiasa menjadi rujukan utama dalam seleksi dan penetapan struktur dan komposisi materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi untuk dimuat dalam kurikulum SMU.

3. Materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum SMU yang disusun berdasarkan pada pendekatan proses berfikir ilmiah yang kuat dan dapat mengakomodasikan materi dari kehidupan aktual secara baik, dapat memperkuat hasrat dan langkah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi serta menjadi bekal pengetahuan praktis untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi yang termuat dalam kurikulum SMU dapat dibangun dan disusun dengan melakukan sinergi antara materi yang bersumber dari pengetahuan sejarah dan pengetahuan geografi yang dibutuhkan peserta didik pada jenjang sekolah menengah dengan memperhatikan aspek perkembangan peserta didik secara psikologis dan sosial, aspek perkembangan teori pembelajaran dan memperhatikan aspek lingkungan belajar.
5. Susunan struktur dan komposisi materi pendidikan sejarah pada jenjang sekolah menengah umum yang termuat dalam kurikulum SMU merupakan materi esensial yang diseleksi dari materi pengetahuan sejarah dengan pendekatan kronologis. Sedangkan susunan struktur dan komposisi materi pendidikan geografi yang termuat dalam kurikulum SMU merupakan materi esensial yang diseleksi dari pengetahuan geografi dengan pendekatan keruangan (spasial) yang telah disesuaikan dengan kepentingan pedagogis pada jenjang pendidikan menengah.

G. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, definisi operasional dimaknai sebagai acuan bagi langkah proses pengumpulan data penelitian dengan penetapan indikator yang dapat dilihat secara konkret dalam konteks penelitian ini.

1. Seleksi dan Penetapan Materi Pendidikan

Dimaknai sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pengembang kurikulum pada langkah pemilihan secara tepatguna, dan langkah pengkondisian dari suatu konsep, proposisi, teori sebagai pengetahuan menjadi materi pendidikan yang bermakna bagi proses pembelajaran pada satu mata pelajaran di sekolah. Materi pendidikan yang dimaksud adalah yang termuat dalam kurikulum mencakup tiga komponen, yakni; sebagai pengetahuan (berupa fakta, keterangan, prinsip-prinsip, definisi), keterampilan dan proses (seperti membaca, menulis, berhitung, berfikir kritis, berkomunikasi lisan dan tulisan) dan nilai-nilai (Hymen, 1973 : 4, Ansyar, 1989 : 115).

2. Tuntutan Teoretis dan Tantangan Masa Depan Pembelajaran IPS

Dimaknai sebagai kondisi dan suasana proses kegiatan belajar peserta didik pada mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran Geografi di sekolah menengah umum, yang dapat mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kaidah dalam teori pembelajaran yang dikenal, serta sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan belajar peserta didik.

Tuntutan teoretis dalam konteks penelitian ini akan dilihat dari karakteristik, ciri, pendekatan dari teori pembelajaran yang dikenal. Tantangan masa depan pembelajaran IPS akan dilihat dari aspek kesesuaian proses pembelajaran yang

dilakukan dengan lingkungan belajar, yakni; perkembangan ilmu pengetahuan sosial, perkembangan sosial budaya dan ciri perkembangan psikologis peserta didik di SMU.

3. Pertimbangan Filosofi Pendidikan dan Teori Pengembangan Kurikulum

Dimaknai sebagai langkah berfikir, bersikap dalam kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum pada proses seleksi dan penetapan suatu keputusan, didasarkan pada pemikiran secara menyeluruh, mendalam, sistematis dan logis dalam perspektif bagaimana seharusnya serta mendasarkan pada teori pendidikan dan teori pengorganisasian kurikulum yang dikenal berkaitan dengan penyusunan lingkup materi pendidikan dalam kurikulum dan sekuensi materi pendidikan berdasarkan urutan tingkat kesukaran.

Pertimbangan filosofi pendidikan dalam konteks penelitian ini akan dilihat dari aspek karakteristik, ciri, fungsi dan tujuan dari filsafat pendidikan yang dikenal. Pertimbangan teori pengembangan kurikulum dalam konteks penelitian ini akan dilihat dari aspek karakteristik, ciri, fungsi dan tujuan dari teori pengembangan kurikulum yang dikenal.

4. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dari Susunan Materi Pendidikan Sejarah dan Geografi Dalam Kurikulum

Kekuatan dalam konteks penelitian ini, dimaknai sebagai faktor yang terkandung dalam susunan materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum SMU yang dapat berpengaruh terhadap konsistensi dan keajegan materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi secara substansial dan pedagogis. Kelemahan, dimaknai sebagai faktor yang dapat menjadi penyebab rapuh dan tidak ajegnya materi pendidikan sejarah dan materi

pendidikan geografi dalam kurikulum secara substansial dan pedagogis. Peluang, dimaknai sebagai faktor yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam konteks proses pembelajaran, dan dalam konteks susunan materi pendidikan secara substansial dan pedagogis sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas materi pendidikan yang termuat dalam kurikulum sekolah. Ancaman, dapat dimaknai sebagai faktor yang dapat dianalisis sebagai sebab dapat terjadinya bias, rapuh, rendah kualitas dan tidak ajegnya susunan materi pendidikan sejarah dan materi pendidikan geografi dalam kurikulum secara substansial dan pedagogis.

Kekuatan dan kelemahan dapat dilihat dari perspektif lingkungan internal bentuk substansi yang terkandung pada materi pendidikan dalam kurikulum, sedangkan peluang dan ancaman dapat dikaji dari perspektif lingkungan eksternal yang mempengaruhi keajegan struktur dan komposisi materi pendidikan yang termuat dalam kurikulum. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam konteks penelitian ini akan dilihat dari aspek pengertian, fungsi, tujuan, ruang lingkup materi pada mata pelajaran sejarah dan mata pelajaran geografi di SMU. Ruang lingkup materi pada mata pelajaran sejarah akan dilihat dari urutan peristiwa sejarah, kebermaknaan materi bagi peserta didik, keluasan dan kedalaman materi. Sedangkan ruang lingkup materi pada mata pelajaran geografi akan dilihat dari perspektif keruangan (spasial) dalam hal lingkungan fisik, lingkungan sosial dan interaksi keduanya, serta kebermaknaan materi bagi peserta didik.

5. Tuntutan Kebutuhan Belajar Peserta Didik

Dalam konteks penelitian ini, tuntutan kebutuhan belajar peserta didik merupakan harapan yang dapat dihasilkan dari suatu proses pembelajaran di sekolah dalam wujud perolehan kemampuan dasar dalam pengetahuan, keterampilan dan nilai dari peserta didik sebagai suatu pengalaman belajar dalam keseluruhan rentang kehidupan sosialnya secara nyata. Aspek yang dilihat dalam penelitian ini merupakan kategori kualitatif, yakni; peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam pengetahuan yang memadai, memiliki sikap yang pasti terhadap sesuatu, dan memiliki kemampuan dasar dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya.

6. Struktur dan Komposisi Materi Pendidikan dalam Kurikulum

Struktur materi pendidikan dimaknai sebagai susunan materi pendidikan yang tersusun memenuhi kriteria pengetahuan secara teoretis akademis, memenuhi kriteria kebutuhan kehidupan secara praktis, serta kesinambungan materi tersebut pada tiap jenjang dan kelas. Komposisi materi pendidikan akan menyangkut tentang sebaran materi pendidikan, perimbangan antara keluasaan dan kedalaman materi dengan alokasi waktu dan masalah kehidupan, serta menyangkut dengan kualitas materi pendidikan.

Dalam konteks penelitian ini, struktur dan komposisi materi pendidikan akan dilihat dari ruang lingkup, keluasaan dan kedalaman materi pendidikan, urutan materi yang layak diberikan pada tiap jenjang dan tiap kelas tertentu, kesinambungan materi pada tiap jenjang dan kelas, perimbangan materi dari tingkat kesulitan dan tingkat kemudahan dari perspektif peserta didik.